

# MENGOPTIMALKAN KEBIJAKAN DESA WISATA: EVALUASI PRIORITAS KEBIJAKAN DENGAN METODE *ANALYTIC HIERARCHY PROCESS* (AHP) DI KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

Oleh

**Nurhadi**

Insitut Pemerintahan Dalam Negeri

nurhadi@ipdn.ac.id

---

## ABSTRACT

### *OPTIMIZING TOURISM VILLAGE POLICIES: EVALUATING POLICY PRIORITIES USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) IN MALANG REGENCY, EAST JAVA PROVINCE*

*This study aims to evaluate and establish policy priorities that can optimize the development of tourist villages using the Analytic Hierarchy Process (AHP) method. AHP allows for an in-depth analysis of various criteria influencing the development of tourist villages and provides more targeted policy recommendations. This research adopts a quantitative approach with a descriptive and explanatory design. Data were obtained from a literature review, including scholarly journals, articles, books, and relevant policy documents. The analysis procedure involved pairwise comparisons to determine the relative weights of six criteria and five alternatives affecting the development of tourist villages. The evaluation results identified that the Regional Regulation (Perda) of Malang Regency No. 2 of 2020 is a priority policy in developing a tourist village in Malang Regency. This policy includes infrastructure improvement, effective promotion, community training, and the preservation of culture and the environment.*

**Keywords:** *Tourist village; Policy evaluation; Analytic Hierarchy Process (AHP)*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menetapkan prioritas kebijakan yang dapat mengoptimalkan pengembangan desa wisata menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). AHP memungkinkan analisis mendalam terhadap berbagai kriteria yang memengaruhi pengembangan desa wisata dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif dan eksplanatori. Data diperoleh dari studi literatur yang meliputi jurnal ilmiah, artikel, buku, dan dokumen kebijakan terkait. Prosedur analisis melibatkan perbandingan berpasangan untuk menentukan bobot relatif dari enam kriteria dan lima alternatif yang memengaruhi pengembangan desa wisata. Hasil evaluasi menetapkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang No. 2 Tahun 2020 merupakan kebijakan prioritas dalam mengembangkan suatu desa wisata di Kabupaten Malang. Kebijakan tersebut mencakup peningkatan infrastruktur, promosi yang efektif, pelatihan masyarakat, serta pelestarian budaya dan lingkungan.

**Kata kunci:** Desa wisata; Evaluasi kebijakan; Analytic Hierarchy Process (AHP)

## PENDAHULUAN

Pengembangan desa wisata merupakan strategi krusial dalam meningkatkan kesejahteraan perdesaan dan mengintegrasikan potensi wisata dengan kehidupan masyarakat lokal. Di Kabupaten Malang, yang dikenal dengan kekayaan alam dan budayanya, potensi desa wisata belum sepenuhnya dimanfaatkan akibat berbagai kendala. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan menjadi penting untuk mengidentifikasi dan menetapkan prioritas kebijakan yang dapat mengoptimalkan pengembangan desa wisata.

Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan prioritas kebijakan secara objektif dan terstruktur. AHP memungkinkan analisis yang mendalam terhadap berbagai kriteria yang memengaruhi pengembangan desa wisata, memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Evaluasi kebijakan ini bertujuan untuk menangani tantangan seperti manajemen yang belum optimal, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kebutuhan peningkatan infrastruktur.

Dalam konteks administrasi publik, kebijakan harus responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat (Denhardt & Denhardt, 2003). Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat sangat penting. Pendekatan AHP diharapkan dapat mengidentifikasi kebijakan yang mendesak dan penting untuk meningkatkan kinerja desa wisata di Kabupaten Malang secara efisien dan efektif.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Desa Wisata

Desa wisata adalah konsep pengembangan wilayah perdesaan yang memanfaatkan potensi lokal untuk menarik

wisatawan dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Menurut Suansri (2003), desa wisata melibatkan masyarakat setempat dalam pengembangan untuk meningkatkan kesejahteraan. Nuryanti (1993) mencatat dampak positif desa wisata dalam meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan melestarikan budaya. Bramwell dan Lane (1993) menambahkan bahwa pengembangan desa wisata yang berkelanjutan harus seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

### Analytic Hierarchy Process (AHP)

Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) yang dikembangkan oleh Saaty (1980) adalah teknik pengambilan keputusan yang melibatkan perbandingan berpasangan untuk menentukan bobot relatif dari berbagai kriteria. AHP efektif untuk masalah kompleks dengan banyak kriteria dan telah diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk manajemen dan perencanaan strategis (Vaidya & Kumar, 2006). Dalam pengembangan desa wisata, AHP membantu dalam mengevaluasi dan memprioritaskan kebijakan secara objektif.

### Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Malang

Kabupaten Malang memiliki potensi wisata yang besar, namun menghadapi tantangan seperti infrastruktur yang kurang memadai dan promosi yang terbatas. Sutanto (2015) menunjukkan perlunya kebijakan dan strategi yang komprehensif. Wijaya (2017) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, kerjasama antar pemangku kepentingan, serta pelatihan dan promosi yang efektif untuk meningkatkan kualitas desa wisata.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif dan eksplanatori untuk mengevaluasi prioritas

kebijakan pengembangan desa wisata di Kabupaten Malang dan menjelaskan hubungan antara kriteria dan subkriteria dalam pengambilan keputusan. Data diperoleh dari studi literatur, termasuk jurnal ilmiah, artikel, buku, dan dokumen kebijakan terkait pengembangan desa wisata dan metode Analytic Hierarchy Process (AHP).

### **Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data, langkah pertama adalah mengidentifikasi sumber literatur relevan dari database akademik seperti Google Scholar dan Scopus. Selanjutnya, lakukan penilaian terhadap literatur tersebut untuk mengidentifikasi kriteria dan subkriteria yang penting. Setelah itu, susun tabel kriteria dan subkriteria yang diperlukan untuk pengembangan model hierarki AHP.

### **Pengembangan Model Hirarki AHP**

Dalam pengembangan model hierarki AHP, mulai dengan menetapkan tujuan penelitian untuk mengevaluasi prioritas kebijakan. Kemudian, identifikasi kriteria utama seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan, serta subkriteria yang relevan berdasarkan literatur. Setelah itu, susun struktur hierarki AHP dengan tiga level yang meliputi tujuan, kriteria, dan subkriteria.

### **Teknik Analisis Data**

Lakukan perbandingan berpasangan untuk elemen di setiap tingkat hierarki menggunakan skala AHP dari 1 hingga 9. Susun matriks perbandingan untuk menghitung bobot relatif elemen, kemudian hitung bobot menggunakan metode eigenvector. Periksa konsistensi pengukuran dengan Consistency Ratio (CR), di mana nilai  $CR < 0,1$  dianggap konsisten. Akhirnya, gabungkan bobot untuk menentukan prioritas kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan desa wisata.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini, kita membahas hasil evaluasi kebijakan desa wisata di Kabupaten Malang menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Evaluasi dilakukan terhadap lima alternatif kebijakan berikut.

### **Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 2 Tahun 2020**

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang No. 2 Tahun 2020 adalah regulasi yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Malang untuk mengatur pengembangan desa wisata. Tujuan utama dari Perda ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata berbasis desa, mengoptimalkan potensi lokal baik dari segi alam, budaya, maupun produk-produk lokal, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata, serta melindungi dan melestarikan lingkungan dan warisan budaya lokal. Perda ini mencakup berbagai aspek dalam pengembangan desa wisata seperti perencanaan dan pengelolaan desa wisata secara berkelanjutan, pengembangan produk wisata, strategi pemasaran dan promosi, penyediaan dan peningkatan fasilitas umum dan infrastruktur pendukung wisata, serta program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam industri pariwisata.

### **Program Jelajah Desa Wisata**

Program Jelajah Desa Wisata merupakan kebijakan inisiatif yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk meningkatkan potensi wisata di daerah perdesaan. Program ini dirancang untuk mempromosikan desa-desa dengan keunikan budaya, sejarah, dan alamnya sebagai destinasi wisata. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan pendapatan desa melalui kegiatan ekonomi seperti homestay, kuliner, dan kerajinan tangan, melestarikan

dan mempromosikan budaya lokal kepada wisatawan, meningkatkan infrastruktur di desa-desa wisata, dan meningkatkan kapasitas serta keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata di desanya. Program ini mencakup identifikasi potensi wisata, pengembangan produk wisata yang unik dan menarik, promosi dan pemasaran secara efektif melalui berbagai media, pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat lokal, serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program.

### **SK Disbudpar Kabupaten Malang No. 556/21/KEP/412.108/2015**

Kebijakan SK Disbudpar Kabupaten Malang No. 556/21/KEP/412.108/2015 adalah inisiatif strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengembangkan desa wisata sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat desa melalui berbagai aktivitas pariwisata, melestarikan warisan budaya dan lingkungan alam desa, membangun serta mengembangkan infrastruktur pendukung pariwisata, memberikan pelatihan kepada masyarakat lokal agar dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan pariwisata, dan membangun kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kebijakan ini mencakup identifikasi dan pengembangan potensi pariwisata di setiap desa, pembangunan fasilitas pendukung pariwisata seperti jalan dan penginapan, pemberdayaan masyarakat lokal, strategi promosi yang menarik dan efektif, serta pelestarian budaya dan lingkungan desa wisata.

### **Program One Village One Product (OVOP)**

Program One Village One Product (OVOP) di Kabupaten Malang bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi lokal melalui pengembangan produk unggulan. Langkah-langkah yang diambil dalam program ini meliputi identifikasi dan seleksi produk unggulan berdasarkan keunikannya serta potensi pasar yang ada, peningkatan kualitas dan inovasi produk untuk memenuhi standar kualitas dan tren pasar yang berkembang, penyediaan pelatihan kepada masyarakat desa dalam berbagai aspek seperti teknik produksi, manajemen usaha, dan pemasaran, penerapan strategi pemasaran yang komprehensif untuk meningkatkan visibilitas produk, serta pengembangan infrastruktur yang diperlukan seperti fasilitas produksi dan distribusi untuk memastikan produk dapat diproduksi dan didistribusikan dengan efisien.

### **Program One Village One Destination (OVOD)**

Program One Village One Destination (OVOD) bertujuan untuk mengembangkan setiap desa di Kabupaten Malang sebagai destinasi wisata unggulan dengan memanfaatkan potensi lokal dan keunikan masing-masing desa. Elemen kunci dari program ini meliputi identifikasi potensi wisata unik di setiap desa seperti keindahan alam dan budaya lokal, pengembangan infrastruktur wisata yang diperlukan seperti penginapan dan pusat informasi wisata, penyediaan pelatihan kepada masyarakat desa dalam pengelolaan wisata dan layanan pelanggan, penerapan strategi pemasaran yang terintegrasi untuk mempromosikan desa sebagai destinasi wisata, serta mendorong kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan destinasi wisata yang terintegrasi.

Adapun dari penjelasan masing-masing alternatif, maka didapatkan enam kriteria utama: pemasaran & promosi, produk lokal, sarana & prasarana, potensi wisata,

pengembangan masyarakat, dan legal & regulasi. Kriteria tersebut merupakan hasil filter elemen-elemen penting yang ada di dalam kebijakan pengelolaan desa wisata.

**AHP PROCESS**

**1. Goals**

Dalam penelitian ini, AHP akan digunakan sebagai metode dalam memetakan kebijakan desa wisata dan mengevaluasi prioritasnya di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hasil penelitian ini diharapkan akan membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih strategis dalam sektor pariwisata desa.

**2. Struktur Hirarki**

Berikut ini merupakan gambaran hirarki yang dibentuk dalam analisis AHP ini dengan enam kriteria dan lima alternatifnya.

**3. Perhitungan Bobot Kriteria dan Alternatif**

**Analisis 1. Relative Measurement & Consistency**

**Analisis Perbandingan Berpasangan Kriteria**

Matriks perbandingan berpasangan menunjukkan penilaian relatif antar kriteria. Berikut adalah matriks perbandingan berpasangan yang sudah diinput:

RELATIVE MEASUREMENT						
C	PEMASARAN & PROMOSI	PRODUK LOKAL	SARANA & PRASARANA	POTENSI WISATA	PENGEMBANGAN MASYARAKAT	LEGAL & REGULASI
PEMASARAN & PROMOSI	1	5	4	2	6	7
PRODUK LOKAL	0,2	1	3	2	5	6
SARANA & PRASARANA	0,25	0,3333333333	1	2	4	5
POTENSI WISATA	0,5	0,5	0,5	1	3	4
PENGEMBANGAN MASYARAKAT	0,1666666667	0,2	0,25	0,3333333333	1	3
LEGAL & REGULASI	0,1428571429	0,1666666667	0,2	0,25	0,3333333333	1
TOTAL	2,25952381	7,2	8,95	7,583333333	19,33333333	26

**Normalisasi Matriks Kriteria**

Untuk mendapatkan matriks normalisasi, setiap elemen pada kolom dibagi dengan jumlah total pada kolom tersebut, hasilnya adalah sebagai berikut.

CONSISTENCY RATIO							
PEMASARAN & PROMOSI	PRODUK LOKAL	SARANA & PRASARANA	POTENSI WISATA	PENGEMBANGAN MASYARAKAT	LEGAL & REGULASI	JUMLAH	RATA-RATA
0,4425711275	0,6944444444	0,4469273743	0,2637362637	0,3103448276	0,2692307692	2,427254807	0,4045424678
0,0885142255	0,1388888889	0,3351955307	0,2637362637	0,2586206897	0,2307692308	1,315724829	0,2192874715
0,1106427819	0,0462962963	0,1117318436	0,2637362637	0,2068965517	0,1923076923	0,9316114295	0,1552685716
0,2212855638	0,0694444444	0,05586592179	0,1318681319	0,1551724138	0,1538461538	0,7874826295	0,1312471049
0,07376185458	0,02777777778	0,02793296089	0,04395604396	0,05172413793	0,1153846154	0,3405373905	0,05675623175
0,06322444679	0,02314814815	0,02234636872	0,03296703297	0,01724137931	0,03846153846	0,1973889144	0,0328981524
1	1	1	1	1	1	1	1

### Matriks Vektor Prioritas

Vektor prioritas dihitung dengan mengambil rata-rata dari setiap baris pada matriks normalisasi. Vektor prioritas ini adalah nilai rata-rata yang menunjukkan bobot dari setiap kriteria:

VEKTOR PRIORITAS	PEMASARAN & PROMOSI	PRODUK LOKAL	SARANA & PRASARANA	POTENSI WISATA	PENGEMBANGAN MASYARAKAT	LEGAL & REGULASI	JUMLAH	RATA-RATA
PEMASARAN & PROMOSI	0,4045424678	1,096437358	0,6210742863	0,2624942098	0,3405373905	0,2302870668	2,955372779	7,305469794
PRODUK LOKAL	0,08090849356	0,2192874715	0,4658057148	0,2624942098	0,2837811588	0,1973889144	1,509665963	6,88441502
SARANA & PRASARANA	0,101135617	0,07309582385	0,1552685716	0,2624942098	0,227024927	0,164490762	0,9835099112	6,334249753
POTENSI WISATA	0,2022712339	0,1096437358	0,07763428579	0,1312471049	0,1702686953	0,1315926096	0,8226576652	6,268006184
PENGEMBANGAN MASYARAKAT	0,06742374463	0,04385749431	0,0388171429	0,04374903497	0,05675623175	0,09869445719	0,3492981058	6,154356887
LEGAL & REGULASI	0,05779178111	0,03654791192	0,03105371432	0,03281177623	0,01891874392	0,0328981524	0,2100220799	6,384008359
								<b>39,330506</b>

### Index Konsistensi

Untuk memeriksa konsistensi dari matriks perbandingan berpasangan, kita menghitung nilai  $\lambda_{max}$  dan Consistency Ratio (CR).

$\lambda_{max}$	rata-rata vektor prioritas: n	<b>6,555084333</b>
CI	$\lambda_{max} - n : n - 1$	<b>0,1110168666</b>
CR	CI : RI jika nilai CR $\leq 0.1$ , maka dianggap konsisten	<b>0,0895297311</b>

Dengan melihat analisis yang ada, maka diperoleh interpretasi hasil sebagai berikut.

- **Pemasaran & Promosi (0.405)** memiliki bobot tertinggi, menunjukkan bahwa ini adalah kriteria paling penting dalam pengembangan kebijakan desa wisata di Kabupaten Malang.
- **Produk Lokal (0.219)** dan **Sarana & Prasarana (0.155)** juga memiliki bobot yang signifikan, menunjukkan pentingnya pengembangan produk lokal dan infrastruktur dalam mendukung pariwisata desa.
- **Potensi Wisata (0.131)**, **Pengembangan Masyarakat (0.057)**, dan **Legal & Regulasi (0.033)** memiliki bobot yang lebih rendah, tetapi tetap penting dalam keseluruhan strategi pengembangan desa wisata.

## Analisis 2. Eigenvalue dan Eigenvector (Matriks Perbandingan)

### Kriteria Pemasaran dan Promosi

PEMASARAN & PROMOSI	Perda Kab.Malang No. 2 Tahun 2020	Program Jelajah Desa Wisata	SK Disbudpar Kab. Malang No. 556/21/KEP/412.108/2015	Program One Village One Product	Program One Village One Destination
Perda Kabupaten Malang No. 2 Tahun 2020	1	7	5	9	6
Program Jelajah Desa Wisata	0,1428571429	1	0,5	3	0,5
SK Disbudpar Kabupaten Malang No. 556/21/KEP/412.108/2015	0,2	2	1	5	2
Program One Village One Product	0,1111111111	0,3333333333	0,2	1	0,1428571429
Program One Village One Destination	0,1666666667	2	0,5	7	1
<b>TOTAL</b>	<b>1,620634921</b>	<b>12,333333333</b>	<b>7,2</b>	<b>25</b>	<b>9,642857143</b>

### Kriteria Produk Lokal

PRODUK LOKAL	Perda Kab. Malang No. 2 Tahun 2020	Program Jelajah Desa Wisata	SK Disbudpar Kab. Malang No. 556/21/KEP/412.108/2015	Program One Village One Product	Program One Village One Destination
Perda Kabupaten Malang No. 2 Tahun 2020	1	3	2	4	5
Program Jelajah Desa Wisata	0,3333333333	1	0,5	2	5
SK Disbudpar Kabupaten Malang No. 556/21/KEP/412.108/2015	0,5	2	1	3	5
Program One Village One Product	0,25	0,5	0,3333333333	1	2
Program One Village One Destination	0,2	0,2	0,2	0,5	1
<b>TOTAL</b>	<b>2,2833333333</b>	<b>6,7</b>	<b>4,0333333333</b>	<b>10,5</b>	<b>18</b>

### Kriteria Sarana dan Promosi

SARANA & PROMOSI	Perda Kab. Malang No. 2 Tahun 2020	Program Jelajah Desa Wisata	SK Disbudpar Kab. Malang No. 556/21/KEP/412.108/2015	Program One Village One Product	Program One Village One Destination
Perda Kabupaten Malang No. 2 Tahun 2020	1	2	3	5	4
Program Jelajah Desa Wisata	0,5	1	2	5	3
SK Disbudpar Kabupaten Malang No. 556/21/KEP/412.108/2015	0,3333333333	0,5	1	2	2
Program One Village One Product	0,2	0,2	0,5	1	0,5
Program One Village One Destination	0,25	0,3333333333	0,5	2	1
<b>TOTAL</b>	<b>2,2833333333</b>	<b>4,0333333333</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>10,5</b>

### Potensi Wisata

POTENSI WISATA	Perda Kab. Malang No. 2 Tahun 2020	Program Jelajah Desa Wisata	SK Disbudpar Kab. Malang No. 556/21/KEP/412.108/2015	Program One Village One Product	Program One Village One Destination
Perda Kabupaten Malang No. 2 Tahun 2020	1	2	4	5	3
Program Jelajah Desa Wisata	0,5	1	3	5	2
SK Disbudpar Kabupaten Malang No. 556/21/KEP/412.108/2015	0,25	0,3333333333	1	2	0,3333333333
Program One Village One Product	0,2	0,2	0,5	1	0,3333333333
Program One Village One Destination	0,3333333333	0,5	3	3	1
<b>TOTAL</b>	<b>2,2833333333</b>	<b>4,0333333333</b>	<b>11,5</b>	<b>16</b>	<b>6,666666667</b>

### Pengembangan Masyarakat

PENGEMBANGAN MASYARAKAT	Perda Kab. Malang No. 2 Tahun 2020	Program Jelajah Desa Wisata	SK Disbudpar Kab. Malang No. 556/21/KEP/412.108/2015	Program One Village One Product	Program One Village One Destination
Perda Kabupaten Malang No. 2 Tahun 2020	1	7	5	3	4
Program Jelajah Desa Wisata	0,1428571429	1	0,3333333333	0,1428571429	0,2
SK Disbudpar Kabupaten Malang No. 556/21/KEP/412.108/2015	0,2	3	1	0,3333333333	0,5
Program One Village One Product	0,3333333333	7	3	1	2
Program One Village One Destination	0,25	5	2	0,5	1
<b>TOTAL</b>	<b>1,926190476</b>	<b>23</b>	<b>11,3333333333</b>	<b>4,976190476</b>	<b>7,7</b>

### Legal dan Regulasi

LEGAL & REGULASI	Perda Kab. Malang No. 2 Tahun 2020	Program Jelajah Desa Wisata	SK Disbudpar Kab. Malang No. 556/21/KEP/412.108/2015	Program One Village One Product	Program One Village One Destination
Perda Kabupaten Malang No. 2 Tahun 2020	1	5	7	3	4
Program Jelajah Desa Wisata	0,2	1	3	0,3333333333	0,5
SK Disbudpar Kabupaten Malang No. 556/21/KEP/412.108/2015	0,1428571429	0,3333333333	1	0,2	0,3333333333
Program One Village One Product	0,3333333333	3	5	1	2
Program One Village One Destination	0,25	2	3	0,5	1
<b>TOTAL</b>	<b>1,926190476</b>	<b>11,333333333</b>	<b>19</b>	<b>5,033333333</b>	<b>7,833333333</b>

### Analisis 3. Perangkingan

Dengan menggunakan bobot prioritas dari setiap kebijakan terhadap masing-masing kriteria, langkah terakhir adalah mengalikan bobot ini dengan bobot prioritas kriteria masing-masing, lalu menjumlahkannya untuk mendapatkan skor total setiap kebijakan.

PERANGKINGAN			
NO	KEBIJAKAN	SKOR	RANGKING
1	Perda Kabupaten Malang No. 2 Tahun 2020	0,4822510931	1
2	Program Jelajah Desa Wisata	0,1553623276	3
3	SK Disbudpar Kabupaten Malang No. 556/21/KEP/412.108/2015	0,1671096742	2
4	Program One Village One Product	0,07414007634	5
5	Program One Village One Destination	0,1211368289	4

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perda Kabupaten Malang No. 2 Tahun 2020

Perda ini menempati peringkat tertinggi dalam analisis AHP dengan skor 0.4822510931. Skor yang tinggi menunjukkan bahwa kebijakan ini mencakup berbagai aspek yang sangat mendukung kriteria yang telah ditentukan.

Perda ini tampaknya memiliki cakupan yang luas dan komprehensif, mencakup pemasaran dan promosi, pengembangan produk lokal, sarana dan prasarana, serta aspek legal dan regulasi. Hal ini membuatnya menjadi kebijakan yang paling prioritas untuk diimplementasikan guna optimalisasi desa wisata di Kabupaten Malang.

### SK Disbudpar Kabupaten Malang No. 556/21/KEP/412.108/2015

Kebijakan ini menempati peringkat kedua dengan perolehan skor 0.1671096742. Meskipun skornya jauh lebih rendah dibandingkan Perda No. 2 Tahun 2020, kebijakan ini tetap penting karena mendukung beberapa kriteria kunci, terutama dalam bidang promosi dan pengembangan sarana. Kebijakan ini mungkin lebih fokus pada implementasi teknis dan operasional yang mendukung program-program wisata yang ada.

### Program Jelajah Desa Wisata

Program ini menempati peringkat ketiga dengan skor 0.1553623276 dan memiliki fokus yang kuat pada pemasaran dan promosi serta potensi wisata. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi

masyarakat serta wisatawan terhadap desa wisata melalui berbagai kegiatan promosi dan eksplorasi desa. Meskipun demikian, program ini mungkin kurang mendukung aspek legal dan regulasi dibandingkan kebijakan lainnya.

### **Program One Village One Destination**

Program ini menempati peringkat keempat dengan skor 0.1211368289 dan memiliki fokus pada pengembangan destinasi wisata yang unik di setiap desa. Tujuannya adalah untuk menciptakan daya tarik wisata yang khas dan berbeda di setiap desa. Meskipun penting, program ini mungkin kurang mencakup aspek pemasaran dan promosi secara luas serta aspek legal dan regulasi yang memadai.

### **Program One Village One Product**

Program ini mendapatkan skor terendah dengan skor 0.07414007634 dan menempati peringkat kelima. Fokus utama dari program ini adalah pengembangan produk lokal yang unik di setiap desa untuk meningkatkan ekonomi lokal. Meskipun penting, program ini mungkin kurang mendukung kriteria lain seperti pemasaran dan promosi, sarana dan prasarana, serta aspek legal dan regulasi yang lebih luas.

### **KETERBATASAN DALAM PENELITIAN**

Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar bersumber dari tinjauan literatur, dokumen pemerintah, dan pendapat ahli. Meskipun sumber-sumber ini memberikan wawasan berharga, mereka mungkin tidak sepenuhnya menangkap realitas lapangan dan perubahan dinamis dalam sektor pariwisata. Selain itu, Penelitian ini hanya berfokus pada Kabupaten Malang, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk wilayah

lain. Setiap daerah memiliki konteks budaya, ekonomi, dan lingkungan yang berbeda, yang dapat memengaruhi prioritas kebijakan pariwisata secara berbeda.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kebijakan untuk optimalisasi desa wisata di Kabupaten Malang menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Dari hasil perhitungan, Perda Kabupaten Malang No. 2 Tahun 2020 menempati peringkat tertinggi sebagai kebijakan prioritas, diikuti oleh SK Disbudpar Kabupaten Malang No. 556/21/KEP/412.108/2015, Program Jelajah Desa Wisata, Program One Village One Destination, dan Program One Village One Product. Peringkat ini mencerminkan pentingnya regulasi formal dan dukungan pemerintah dalam mengembangkan dan mengoptimalkan desa wisata.

### **Saran**

Pemerintah Kabupaten Malang perlu memperkuat regulasi dan memastikan implementasi Perda No. 2 Tahun 2020 dengan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku pariwisata harus ditingkatkan untuk memaksimalkan manfaat program seperti Jelajah Desa Wisata dan One Village One Destination. Diversifikasi produk lokal juga penting untuk meningkatkan daya tarik desa wisata, dengan dukungan teknis dan pemasaran untuk program One Village One Product. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan diperlukan untuk menyesuaikan strategi sesuai dengan feedback dari masyarakat dan pelaku industri pariwisata, agar kebijakan tetap relevan dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bramwell, B., & Lane, B. (1993). Sustainable Tourism: An Evolving Global Approach. *Journal of Sustainable Tourism*, 1(1), 1-5.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. M.E. Sharpe.
- Nuryanti, W. (1993). Concept, Perspective and Challenges. *Journal of Sustainable Tourism*, 1(3), 2-10.
- Saaty, T. L. (1980). *The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. McGraw-Hill.
- Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook*. Responsible Ecological Social Tours (REST).
- Sutanto, E. (2015). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Malang. *Jurnal Pariwisata*, 2(1), 14-25.
- Vaidya, O. S., & Kumar, S. (2006). Analytic Hierarchy Process: An Overview of Applications. *European Journal of Operational Research*, 169(1), 1-29.
- Wijaya, I. (2017). Strategi Pembangunan Desa Wisata di Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi & Pembangunan*, 5(2), 45-56.
- Pemerintah Kabupaten Malang. (2020). Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 2 Tahun 2020 tentang Pengembangan Desa Wisata.
- Pemerintah Kabupaten Malang. (2015). SK Disbudpar Kabupaten Malang No. 556/21/KEP/412.108/2015 tentang Pengembangan Desa Wisata.
- Pemerintah Kabupaten Malang. Program Jelajah Desa Wisata.
- Pemerintah Kabupaten Malang. Program One Village One Destination (OVOD).
- Pemerintah Kabupaten Malang. Program One Village One Product (OVOP).